

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemukan bahwa terdapat 26 perangkat desa yang diberhentikan oleh Penjabat Kepala Desa Motaulun dengan Surat Keputusan Nomor 138 Ds.Mtln.140/3/II/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Motaulun Tahun Anggaran 2022. Hasil penelitian yang ditemukan dalam wawancara terhadap dua (2) orang perangkat desa atas nama Daniel Seran selaku kepala dusun mamuluk dan Yosep Bria Laluit selaku kepala dusun babanuk bahwa peristiwa Pemberhentian Perangkat Desa yang terjadi di desa Motaulun Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka tidak sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang ada dalam pasal 5 ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa. Penjabat kepala desa Motaulun tidak memperhatikan rekomendasi tertulis dari camat Malaka Barat sehingga tindakan penjabat Kepala Desa Motaulun menyalahi wewenangnya.

5.2 Saran

Pemberhentian perangkat desa yang terjadi di desa motaulun dapat melakukan dua upaya yaitu pertama, upaya administrasi yang terdiri dari keberatan dan banding dan kedua, upaya peradilan yaitu mengajukan gugatan kepada pemerintah daerah atas bupati kabupaten malaka sebagai tergugat

sebagai atasan pejabat kepala desa motaulun dengan objek sengketa surat keputusan. Selain itu masyarakat dan kepala desa juga belum mengetahui adanya permendagri ini sekaligus sosialisasinya sehingga pada akhirnya masyarakat yang melek/buta hukum akan menjadi korban bagi tindakan penguasa atau rezim yang berkuasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ateng Syafrudin, “*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22.

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang, Yuridika*, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997,

Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta, 1998. hal. 76

Ronny Hanitiyo Sumitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* Jakarta: Ghalia Indonesia,

Prajudi Admosudirjo, Juni 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan kesembilan (Revisi), Jakarta: Ghalia Indonesia,

Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

PermenDagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan